



Strategi Kebijakan Pendidikan Jenjang Menengah di Kalimantan Tengah: Analisis Deskriptif Menuju Program Satu Keluarga Satu Sarjana

Yunanae Eka Asi Ilas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah, Indonesia

Email: yunanae.sali@gmail.com

Keywords

average length of school (rls), one family one bachelor program, middle level flying teacher program, central kalimantan province.

Abstract

The phenomenon of low opportunities for secondary school opportunities in Central Kalimantan is marked by many residents in Central Kalimantan, especially in rural areas, not continuing to high school/equivalent in the midst of the challenges of achieving the One Family One Undergraduate Program in Central Kalimantan. The average length of school for residents 15 years and older is 9.36 years or equivalent to grade IX junior high school/equivalent (Central Kalimantan Education Statistics in 2025, BPS Central Kalimantan Province, 2026). This study uses a qualitative approach with descriptive analysis. Data processing techniques use taxonomic analysis, data collection techniques with documentation techniques. The approach used in this study uses the 8-step method approach Bardach (2012). Determination of the root of the problem by ultrasound (Urgency, Seriousness, Growth) method. Then the determination of policy selection using the Weighted Scoring Model (WSM) method. The Weighted Scoring Model is an evaluation method used to assess and select policy alternatives by calculating the score of each policy alternative using the weighting of predetermined criteria. This study aims to provide recommendations to the Central Kalimantan provincial government to overcome the low educational opportunities at the secondary level. So that the One Family One Undergraduate Program can be achieved. Key findings of this study indicate that the low opportunities for accessing secondary education in Central Kalimantan are caused by both natural and artificial factors. The natural factors include geographical, topographical, hydrological, geological, and demographic conditions. Meanwhile, the artificial factors include the lack of educational facilities and infrastructure, as well as insufficient supporting infrastructure such as road and bridge transportation systems. The recommended policy for the Central Government is to establish a Ministerial Regulation of Primary and Secondary Education concerning the implementation of education in remote areas. For the Provincial Government of Central Kalimantan, the recommended policy is the implementation of a "Flying Teacher Program" for the secondary education level

Kata Kunci:

rata-rata lama sekolah (rls), program satu keluarga satu sarjana, program guru terbang jenjang menengah, provinsi kalimantan tengah.

Abstrak

Fenomena rendahnya peluang kesempatan sekolah jenjang menengah di Kalimantan Tengah ditandai dengan banyak penduduk di Kalimantan Tengah terutama di perdesaan tidak melanjutkan ke SMA/ sederajat ditengah tantangan mencapai Program Satu Keluarga Satu Sarjana di Kalimantan Tengah. Rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas 9,36 Tahun atau setara kelas IX SMP/ sederajat (Statistik Pendidikan Kalimantan Tengah Tahun 2025, BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2026). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengolahan data menggunakan analisis taksonomi, teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 8 langkah Bardach (2012). Penentuan akar masalah dengan dengan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth). Kemudian penetapan pemilihan kebijakan dengan metode Weighted Scoring Model (WSM). Weighted Scoring Model adalah metode evaluasi yang digunakan untuk menilai dan memilih alternatif kebijakan dengan menghitung skor tiap alternatif kebijakan menggunakan bobot kriteria yang sudah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk memberi rekomendasi

kepada pemerintah provinsi Kalimantan Tengah untuk mengatasi rendahnya kesempatan sekolah di jenjang menengah. Sehingga Program Satu Keluarga Satu Sarjana dapat tercapai. Temuan Kunci pada penelitian ini adalah penyebab rendahnya peluang kesempatan sekolah jenjang menengah di Kalimantan Tengah karena faktor alamiah yakni kondisi geografis, topografis, hidrologi, geologis dan demografis dan faktor artificial yakni kurangnya sarana prasarana pendidikan dan kurangnya infrastruktur seperti sistem transportasi jalan dan jembatan. Kebijakan yang direkomendasikan untuk Pemerintah Pusat adalah membuat Peraturan Menteri Pendidikan dasar dan Menengah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di daerah Pedalaman dan rekomendasi untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah Program Guru Terbang Jenjang Menengah.

PENDAHULUAN

Pendidikan sering disebut sebagai kunci utama sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas (Artamevia et al., 2025; Asrulla et al., 2024; Silalahi et al., 2022). Dan SDM yang berkualitas dapat memberikan dampak daya saing yang tinggi pada manusianya atau penduduk suatu negara/daerah. Suatu negara atau daerah akan mampu bersaing dalam segala bidang jika SDM nya berkualitas atau berkompeten. Dan jika negara atau daerah mampu bersaing dalam segala bidang maka kesempatan untuk menjadi negara atau daerah maju bisa diraih (AdiTriyanto et al., 2022; Yulianti et al., 2023).

Kesepakatan pada KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) Pembangunan Berkelanjutan 2015 atau UN Sustainable Development Summit 2015. Para pemimpin dunia yang terdiri dari 193 pemimpin negara mengadopsi agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang mencakup 17 Sustainable Development Goals (SDGs), termasuk SDG 4 tentang pendidikan berkualitas dan inklusif untuk semua (United Nations, 2015, <https://sdgs.un.org/goals>).

Pendidikan sangat nyata dapat mendorong kemajuan bangsa, negara atau suatu daerah secara ekonomi, keamanan, sosial, membentuk karakter dan moral bangsa melalui belajar ilmu dan keterampilan/keahlian di berbagai bidang, penanaman nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, toleransi, mencegah faham/ideologi radikal, mencegah penggunaan narkoba dan dapat mengurangi kemiskinan. SDM yang berpendidikan biasanya mampu meningkatkan taraf hidupnya dan keluarganya (Faiq & Putra, 2025; Fauzi & Subur, 2025; Yansyah et al., 2024).

Pendidikan sangat penting bagi taraf hidup individunya, menurut Teory Human Capital (Becker, 1964), bahwa investasi dalam modal manusia berupa pendidikan, telah memberikan tingkat pengembalian yang substansial melalui peningkatan pendapatan bagi individu. Jadi pendidikan dapat meningkatkan pendapatan.

Pendidikan membuka pintu kesempatan bagi individu untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan pendidikan, seseorang memiliki akses lebih luas ke lapangan kerja, peluang ekonomi yang lebih baik, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam meningkatkan kesadaran sosial, kesehatan, dan partisipasi politik masyarakat. Masyarakat yang terdidik cenderung lebih produktif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

Mendapatkan atau memperoleh pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan dan fasilitas bagi warganya untuk mendapatkan pendidikan. Menurut Pasal 28C Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Ini menjelaskan kepada kita bahwa Negara kita sadar bahwa pendidikan bermanfaat untuk kualitas manusia dan menjadikan kesejahteraan bagi umat manusia.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Ini menjelaskan bahwa Negara kita mewujudkan pendidikan dengan perlu diupayakan dan direncanakan. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal (Pasal 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003). Di Indonesia pada jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Di era sekarang ini, mendapatkan pendidikan dan berhak memperoleh manfaat dari pendidikan yang ditempuhnya bukan saja merupakan hak dasar manusia tetapi menjadi kebutuhan hidup setiap manusia. Kesadaran dan keinginan bersekolah penduduk Indonesia terutama di perkotaan cukup tinggi akan tetapi tidak di perdesaan. Inilah sebabnya pemerintah dan pemerintah daerah di Indonesia wajib membuka akses seluas-luasnya bagi warga negara untuk berpendidikan.

Di perkotaan dan pada level masyarakat menengah ke atas kesadaran bersekolah sudah ditunjang sarana prasarana dan fasilitas yang cukup. Tetapi di daerah perdesaan walaupun ada kesadaran dan keinginan dari penduduknya tetapi sering terkendala pada minimnya sarana, prasarana, fasilitas, akses pencapaian lokasi dan faktor eksternal di luar penyelenggara pendidikan seperti kemampuan ekonomi penduduknya.

Penyelenggaraan pendidikan adalah bidang yang sangat konprehensif karena berkaitan dengan berbagai sektor lainnya, seperti SDM guru pada jumlah maupun kualitasnya, manajemen pendidikan, sarana prasarana gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, sarana pencapaian menuju sekolah seperti jalan dan jembatan.

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas di Indonesia dengan luas 153.443, 91 Km² atau 15,3 juta Ha (BPS RI, 2025) yang jika dibandingkan dengan luas pulau Jawa, luas Kalimantan Tengah sekitar 1,5 kali luas Pulau Jawa. Selain dari pada itu provinsi Kalimantan Tengah terdata sebagai provinsi yang kaya akan sumberdaya alam di sektor perkebunan dan pertambangan.

Dan di sektor kehutanan, Kalimantan Tengah adalah pendukung Indonesia sebagai paru-paru dunia, karena sekitar 12,7 juta Ha hutan di Kalimantan Tengah (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, 2025) menjadi penyangga utama keseimbangan lingkungan dan penyangga sumber kehidupan bagi masyarakat. Artinya sekitar 82,7% dari luas Provinsi Kalimantan berbentuk lahan tertutup vegetasi.

Kalimantan Tengah punya aset dan potensi untuk mencapai kemajuan, diantaranya luas wilayah, dan sumberdaya alam, namun untuk mencapai daerah yang maju tidak hanya dengan luas wilayah dan sumberdaya alam yang berlimpah. Untuk mencapai ekonomi yang tinggi juga perlu manusia sebagai subjek atau aktor pelaksana pembangunan dan tentu harus SDM yang berkualitas yang mana SDM yang berkualitas bisa diperoleh dengan pendidikan.

Fenomena di Kalimantan Tengah terkait pendidikan adalah kesempatan bersekolah ke jenjang pendidikan menengah sangat rendah. Tidak semua penduduk Kalimantan Tengah bisa duduk sampai jenjang pendidikan menengah. Ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 15 tahun keatas sebesar 9,36 tahun (Statistik Pendidikan Kalimantan Tengah Tahun 2025, BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2026). Artinya rata-rata penduduk Kalimantan Tengah yang telah berusia 15 tahun ke atas menempuh pendidikan selama 9 tahun atau hanya sampai kelas IX SMP/ sederajat. Ini berada dibawah rata-rata lama sekolah nasional.

Kemudian RLS penduduk usia 25 tahun ke atas sebesar 8,96 tahun (Berita Resmi Statistik/BRS, BPS Provinsi Kalimantan Tengah, November 2025). Artinya rata-rata penduduk Kalimantan Tengah usia 25 tahun keatas bersekolah hanya 8 tahun atau setara sama kelas VIII SMP/ sederajat. Usia 25 tahun seharusnya adalah usia telah lulus sekolah menengah, tetapi di Kalimantan Tengah secara rata-rata hanya sekolah sampai kelas VIII SMP/ sederajat.

Ditinjau dari Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang menengah (SMA) Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 sebesar 63,31% (Statistik Pendidikan Kalimantan Tengah Tahun 2025, BPS Kalimantan Tengah, 2026). Ini menunjukkan pada tahun 2025 ada 63,31% penduduk usia SMA yang bersekolah sedangkan sisanya hampir 37% (di analisis, 2026) tidak berkesempatan duduk bersekolah di SMA/ SMK. Dan dilihat dari pendidikan terakhir yang ditamatkan, penduduk Kalimantan Tengah terbanyak pada tamatan/ lulusan SD dan SMP sebesar 53,17% (Statistik Pendidikan Kalimantan Tengah Tahun 2025, BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2026) ini menunjukkan 50 persen lebih penduduk Kalimantan Tengah hanya lulusan SD dan SMP.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045, letak Geografis Kalimantan Tengah berada di tengah pulau Kalimantan, berada di antara 0°45' Lintang Utara dan 3°30' Lintang Selatan dan 110°45'-115°51' Bujur Timur. Secara administrasi wilayah terdiri dari 13 kabupaten dan 1 Kota. Secara Topografis Kalimantan Tengah terbagi tiga kontur yaitu pegunungan, dataran dan rawa. Dengan wilayah utara berupa dataran tinggi, daerah perbukitan dan pegunungan, bagian tengah berupa dataran sedang dan daerah perbukitan dengan ketinggian 50-150 mdpl, bagian selatan berupa daerah pantai dan rawa-rawa dengan ketinggian 0-50 mdpl. Kondisi hidrologi Kalimantan Tengah terdapat banyak sungai besar dan kecil. Tutupan lahan masih banyak berupa hutan tropis seluas 12,7 juta Ha (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, 2025). Kondisi geografis, topografis dan hidrologis sangat berpengaruh pada penyelenggaraan pendidikan. Jarak antar desa cukup jauh yang dipisahkan sungai, hutan, rawa yang belum tersedia infrastrukturnya berpengaruh pada jarak dan waktu tempuh pencapaian menuju sekolah.

Secara geologis, jenis-jenis tanah di Kalimantan Tengah adalah Organosol, Aluvial, Regosol, Polsolik Merah Kuning (PMK), Podsol, Latosol, Litosol, dan Laterit (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, 2025). Tanah Organosol adalah organosol merupakan tanah yang proses pembentukannya dari hasil pembusukan bahan-bahan organik seperti tanah gambut (Ir. Palupi Pusporini dan Gelvin Iqbal P, SP., MM, 2024). Hubungan geologis (struktur tanah) suatu wilayah dengan penyelenggaraan pendidikan adalah pada bangunan gedung, sarana dan prasarana pendidikan seperti jalan dan jembatan memerlukan tanah yang kokoh stabil untuk lokasinya. Pada tanah gambut adalah tanah lembek yang sangat tidak stabil

untuk bangunan gedung, jalan dan jembatan sehingga perlu rekayasa struktur untuk menjadi lokasi bangunan, sarana dan prasarana sekolah dan itu perlu biaya tinggi.

Dari sisi demografis, penduduk provinsi Kalimantan Tengah saat ini sebanyak 1.470 jiwa (Ditjen Dukcapil, Kementerian dalam Negeri, 2025). Kepadatan penduduk Kalimantan Tengah adalah 19 jiwa per Km². (Statistik Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2025). Artinya persebaran penduduk untuk tiap 1 km² luas hanya 19 jiwa. Penduduk tersebar tidak merata. Sedangkan luas wilayahnya sangat luas.

Kondisi wilayah seperti tersebut di atas, baik secara geografis, topografis, hidrologi, geologis dan demografis, menjadikan tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan di Kalimantan Tengah. Semakin jauh desa dari ibukota provinsi atau ibukota Kabupaten maka fasilitas sarana prasarana sekolah semakin minim. Lokasi satuan pendidikan jenjang menengah tidak merata di semua wilayah dan semua desa.

Ashley Gunter, (2025), dalam penelitiannya menyebutkan geografi dan infrastruktur fisik dan digital, hambatan ekonomi menurunkan hasil belajar di daerah perdesaan. Pada penelitian sebelumnya. Feibe Engelina Pijoh, (2025), dalam penelitiannya menyebutkan penyebab rendahnya akses pendidikan di pedalaman adalah hambatan struktural (infrastruktur, akses internet dan sumberdaya finansial, Faktor Budaya dan Sosial (Gender dan Keluarga). Kexin Zhang (2025), dalam penelitiannya menyebutkan tantangan pendidikan di daerah pedalaman dan terpencil adalah infrastruktur yang buruk, sumberdaya yang terbatas dan kurangnya pelatihan guru. Jhon Retei Alfri Sandi dan Glory Kriswantara, (2025), menyebutkan bahwa defisiensi infrastruktur dan kondisi topografis Kalimantan Tengah.

Permasalahan (Problem Statement) dalam penelitian ini adalah banyak penduduk di Kalimantan Tengah terutama di perdesaan tidak melanjutkan ke SMA/ sederajat (Rata-rata lama sekolah 9,36 Tahun (Statistik Pendidikan Kalimantan Tengah Tahun 2025, BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2026) dikarenakan akses pendidikan menengah sulit terjangkau sampai di perdesaan (Statistik Pendidikan Kalimantan Tengah Tahun 2025, BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2026), dalam hal ini tidak semua desa mempunyai sekolah jenjang menengah (Dapodik, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025) sehingga menyebabkan rendahnya peluang kesempatan sekolah jenjang menengah (SMA/SMK) di Kalimantan Tengah yang mempengaruhi rendahnya kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah.

Kondisi permasalahan banyak penduduk di Kalimantan Tengah terutama di perdesaan tidak melanjutkan ke SMA/ sederajat ini sudah berlangsung lama. Ini adalah tantangan besar dan mendesak untuk segera diatasi bagi provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat mengatasi masalah pendidikan jenjang menengah ini.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, dengan 3 visi utamanya adalah Kalimantan Tengah Berkah, Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Maju, Kalimantan Tengah Martabat. Terdapat Program “Betang Cerdas” yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran di Provinsi Kalimantan Tengah dengan menyediakan pendidikan gratis dan insentif bagi tenaga pengajar. Program ini memastikan akses pendidikan yang merata.

Sesuai RPJMD di atas. dalam program “Betang Cerdas” di Kalimantan Tengah ini terdapat program prioritas yang terkenal dengan nama program “Sekolah/Kuliah Gratis dan Satu Keluarga Satu Sarjana”. Satu keluarga satu sarjana merupakan program strategis yang

mendorong setiap keluarga untuk memiliki minimal satu anggota keluarga lulusan perguruan tinggi. Program ini bertujuan meningkatkan mobilitas sosial dan mengurangi kesenjangan pendidikan. Dan program ini dimulai pada tahun 2026 ini sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026.

Dengan kondisi Kalimantan Tengah saat ini masih keterbatasan akses pendidikan jenjang menengah, maka tujuan mulia Program Satu Keluarga Satu Sarjana, sulit dicapai secara optimal. Tantangan rendahnya peluang kesempatan sekolah jenjang menengah (SMA/SMK) di Kalimantan Tengah tentunya mempengaruhi ketercapaian program prioritas bidang pendidikan sesuai RKPD Provinsi Kalimantan Tengah “Sekolah/Kuliah Gratis dan Satu Keluarga Satu Sarjana”, sehingga pemerintah provinsi Kalimantan Tengah harus mempunyai strategi untuk mengatasi permasalahan pada pendidikan jenjang menengah ini.

Penelitian ini bertujuan untuk memberi rekomendasi kepada pemerintah provinsi Kalimantan Tengah untuk mengatasi rendahnya kesempatan sekolah di jenjang menengah. Dimulai mencari penyebab masalah kemudian menyusun alternatif kebijakan yang komprehensif dan tepat untuk dapat mengatasi permasalahan di Kalimantan Tengah pada bidang pendidikan jenjang menengah ini. Diharapkan hasil kebijakan yang didapat dari penelitian ini dapat mengatasi rendahnya peluang kesempatan sekolah jenjang pendidikan menengah di Kalimantan Tengah, yang ditunjukkan dengan meningkatnya rata lama-lama sekolah provinsi Kalimantan Tengah sehingga kualitas pendidikan dapat meningkat.

Sebagian besar penelitian-penelitian sebelumnya menyebutkan temuannya penyebab utama akses pendidikan di daerah perdesaan dan pedalaman adalah faktor geografi dan infrastruktur fisik, infrastruktur digital, kondisi, dan kualitas guru (Gunter, 2025; Pijoh, 2025; Sandi, 2025; Zhang, 2025). Dalam penelitian ini akan menambahkan faktor lain yang menjadi penyebab rendahnya akses pendidikan adalah faktor hidrologi, geologis dan demografis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan analisis taksonomi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode 8 langkah Bardach (2012) yakni 1). mendefinisikan masalah, 2). mengumpulkan bukti (data), 3). menyusun alternatif kebijakan, 4). membuat kriteria, 5). memproyeksikan hasil yang diperoleh dari alternatif kebijakan. 6). membuat pertimbangan penilaian, 7). menentukan kebijakan yang dipilih, 8). membuat rekomendasi kebijakan bagi pemangku kebijakan.

Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci. Teknik dokumentasi adalah mengumpulkan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah berupa peraturan, kebijakan, dan data statistik, serta dari penelitian sejenis sebelumnya. Teknik pengolahan data analisis taksonomi adalah pengelompokan data sesuai kategorinya.

Pengumpulan data dari dokumen yang sudah dipublikasikan oleh instansi terkait yang berwenang yakni BPS Provinsi Kalimantan Tengah, BPS RI, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, BKKBN RI, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah. Teknik pengolahan

data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Data dikelompokkan dengan sesuai kategori data. Seluruh data diverifikasi dari beberapa sumber lainya.

Analisis dilakukan dengan Metode Bardach (2012), bahwa terdapat fenomena rendahnya peluang kesempatan sekolah jenjang menengah di Kalimantan Tengah. Penyebab dari fenomena ini dianalisis dengan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*), telah didapat suatu masalah penyebabnya, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah banyak penduduk di Kalimantan Tengah terutama di perdesaan tidak melanjutkan ke SMA/ sederajat (Rata-rata lama sekolah 9,36 Tahun (Statistik Pendidikan Kalimantan Tengah Tahun 2025, BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2026)

Tahap berikutnya adalah mengkonstruksi/membuat alternatif kebijakan yang potensial untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas. Prinsip membuat kebijakan sesuai metode Bardach (2012) yakni bisa menyelesaikan masalah dan dapat diterapkan. Agar kebijakan lebih komprehensif dibuat 4 alternatif kebijakan. Kemudian membuat kriteria untuk mengevaluasi alternatif kebijakan untuk mendapatkan kebijakan yang paling tepat digunakan. Kriteria yang dibuat sesuai metode Bardach (2012) yakni Efektifitas, Efisien, Kelayakan, dan Kemudahan Pelaksanaan. Kemudian memberi proyeksi hasil yang didapat dari tiap-tiap alternatif kebijakan dilanjutkan dengan menilai nilai baik buruk, untung rugi tiap alternatif kebijakan dengan memberi skor pada tiap alternatif kebijakan proyeksi hasil sampai penetapan pemilihan kebijakan dengan metode *Weighted Scoring Model* (WSM). *Weighted Scoring Model* adalah metode evaluasi yang digunakan untuk menilai dan memilih alternatif seperti program, proyek, atau keputusan dengan menghitung skor tiap alternatif kebijakan dengan menggunakan bobot kriteria yang sudah ditetapkan oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pendidikan menengah di Kalimantan Tengah mengalami banyak hambatan dan tantangan. Rendahnya peluang kesempatan sekolah jenjang menengah di Kalimantan Tengah merupakan fenomena yang terjadi sejak lama. Berdasarkan BPS Provinsi Kalimantan Tengah, angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Kalimantan Tengah penduduk usia 25 Tahun ke atas sepanjang tahun 2020-2025 berkisar di rentang 8,59 tahun sampai dengan 8,96 tahun, dengan pertumbuhan sebesar 1,70%. Walaupun secara data angka tren RLS tahun 2020-2025 ini terjadi kenaikan setiap tahun tetapi secara nyata sepanjang periode tahun 2020-2025 penduduk Kalimantan Tengah usia 25 tahun ke atas sekolah hanya sampai kelas VIII SMP/ sederajat.

Untuk melihat perkembangan RLS Penduduk usia 25 tahun ke atas di Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Grafik 1 dibawah ini:

Grafik 1 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Kalimantan Tengah penduduk usia 25 Tahun, tahun 2020-2025



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2025

Sebagian besar masyarakat Kalimantan Tengah masih menghadapi keterbatasan dalam mendapatkan pendidikan. Pada penduduk usia 15 Tahun ke atas RLS sebesar 9,36 tahun. Artinya pada penduduk usia sekolah pun yang bersekolah hanya selama 9,36 tahun atau sampai kelas IX SMP/ sederajat.

Grafik 2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Kalimantan Tengah penduduk usia 15 Tahun ke tahun 2020-2025



Sumber: BPS RI, 2025

Pendidikan menengah SMA/SMK adalah tahap penting dan syarat bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi untuk mencapai gelar sarjana. Program Satu Keluarga Satu Sarjana berarti dalam tiap keluarga minimal ada 1 orang anggota keluarga yang lulus perguruan tinggi dan menyandang gelar sarjana. Untuk itu pendidikan menengah di Kalimantan Tengah yang aksesnya rendah ini harus segera diatasi.

Tanpa ada ijazah kelulusan SMA/ sederajat, setiap orang tidak bisa masuk perguruan tinggi menjadi sarjana. Mendorong Program Satu Keluarga Satu Sarjana harus dimulai dengan meningkatkan jumlah penduduk usia SMA/ sederajat duduk sekolah dan mendapatkan ijazah kelulusan SMA/ sederajat.

Dengan melihat Grafik 1 di atas menunjukkan bahwa rendahnya Rata-rata lama Sekolah Kalimantan Tengah sudah dari tahun 2020 sampai dengan saat ini masih berkisar di angka 8 Tahun. Sehingga ini sangat mendesak untuk diatasi, perlu upaya nyata untuk

mengatasinya. Program Satu Keluarga Satu Sarjana tidak mungkin tercapai target-targetnya. Pada grafik 2 menunjukkan perkembangan RLS penduduk usia 15 Tahun ke atas dari tahun 2020-2025. Secara pertumbuhan dari tahun 2020 sampai tahun 2025 ada tren meningkat tetapi tetap hanya sampai sekolah SMP/ sederajat.

Program Satu Keluarga Satu Sarjana mendorong agar dalam 1 keluarga ada anggota keluarga lulus sarjana S1. Dengan kondisi banyak penduduk yang tidak lulus SMA/ sederajat terutama di perdesaan di daerah pedalaman. Karenanya akar masalah dari adanya fenomena ini harus dicari untuk dapat segera dicari solusinya.

Penentuan akar masalah rendahnya peluang kesempatan sekolah jenjang menengah di Kalimantan Tengah ini dengan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) mendapatkan penyebab utamanya adalah banyak penduduk/masyarakat usia sekolah menengah di Kalimantan Tengah tidak melanjutkan ke SMA/ sederajat.

Banyak penduduk/masyarakat di Kalimantan Tengah tidak melanjutkan ke SMA/ sederajat disebabkan karena 3 penyebab yaitu 1). akses pendidikan menengah sulit (Statistik Pendidikan Kalimantan Tengah Tahun 2025, BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2026), 2). banyak penduduk usia sekolah menengah mengakhiri masa pendidikannya lebih cepat (Statistik Pendidikan Kalimantan Tengah Tahun 2025, BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2026), dan 3). disebabkan Pemerintah Daerah kurang merencanakan dan melaksanakan program kegiatan untuk sarana prasarana pembangunan satuan pendidikan gedung sekolah baru) dari APBD (Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, 2026).

Yang dimaksud dengan akses pendidikan adalah kesempatan dan kemudahan mendapatkan pendidikan. Di Provinsi Kalimantan Tengah akses pendidikan jenjang menengah sulit terjangkau terutama di wilayah perdesaan. Akses pendidikan menengah di Kalimantan Tengah sulit dikarenakan banyak faktor penyebabnya. Penyebabnya utamanya adalah ada 3 sebab yaitu banyak desa tidak mempunyai sekolah jenjang menengah (Dapodik, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025), adanya defisiensi infrastruktur (Jhon Retei Alfri Sandi dan Glory Kiswantara, 2025) dan kondisi topografis yang sulit (Jhon Retei Alfri Sandi dan Glory Kiswantara, 2025)

Jumlah desa di Kalimantan tengah termasuk permukiman transmigrasi yang masih dibina kementeriannya adalah 1577 Desa (Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2026, BPS Kalimantan Tengah, 2026). Menurut Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang dikutip dari Dapodik, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, jumlah satuan pendidikan dibawah kewenangan provinsi Kalimantan Tengah pada jenjang menengah (SMA/ SMK dan SLB) sebanyak 432 satuan pendidikan. Ini menunjukkan tidak semua desa di Kalimantan Tengah memiliki satuan pendidikan jenjang menengah.

Kondisi di Kalimantan Tengah dengan fakta tidak semua desa memiliki fasilitas sekolah menengah atau satuan pendidikan SMA/ sederajat, sangat berpengaruh pada kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah karena jarak tempuh ke desa terdekat yang ada satuan pendidikan SMA/ sederajat jauh karena memang luas wilayahnya. Penduduk usia SMA/ sederajat jika ingin bersekolah harus berpindah ke desa terdekat yang ada satuan pendidikan SMA/ sederajat atau ke ibukota kecamatan. Itupun biasanya dengan ikut menumpang atau menyewa di rumah kerabatnya, sehingga hal ini memungkinkan untuk yang ekonominya mampu tetapi tidak untuk yang ekonominya tidak mampu. Menurut BPS

Kalimantan Tengah (2026), di Kalimantan Tengah melanjutkan SMA/ sederajat pada umumnya ditempuh oleh siswa dengan status ekonomi menengah ke atas.

Menurut Jhon Retei Alfri Sandi dan Glory Kriswantara, (2025), menyebutkan bahwa defisiensi infrastruktur dan kondisi topografis Kalimantan Tengah adalah penyebab akses pendidikan rendah di Kalimantan Tengah. Defisiensi infrastruktur adalah kekurangan/ketiadaan fasilitas dasar (jalan, jembatan, listrik, air bersih, jaringan komunikasi) menyebabkan akses pendidikan menengah di Kalimantan Tengah sulit terjangkau. Infrastruktur antar desa, desa ke ibukota kecamatan yang belum tersedia mengakibatkan jarak tempuh ke sekolah dari rumah semakin jauh.

Kondisi topografis Kalimantan Tengah, menjadi penyebab sulitnya akses pendidikan menengah di Kalimantan Tengah. Keberadaan desa-desa di daerah pedalaman yang tidak ada sekolah SMA, sedangkan jarak menuju desa terdekat yang ada sekolah SMA/ sederajat nya cukup jauh, dengan topografi sungai, rawa dalam dan hutan luas. Dengan melewati sungai, hutan, rawa, semakin mempersulit akses pendidikan menengah di Kalimantan Tengah.

Banyaknya penduduk/masyarakat di Kalimantan Tengah tidak melanjutkan ke SMA/ sederajat disebabkan juga karena banyak penduduk usia sekolah menengah mengakhiri masa pendidikannya lebih cepat (Statistik Pendidikan Kalimantan Tengah Tahun 2025, BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2026). Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan jumlah peserta didik jenjang menengah pada tahun 2025 menurun, pada SMA pertumbuhannya -0,47% dan pada SMK -1,28% (Statistik Pendidikan Kalimantan Tengah Tahun 2025, BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2026).

Banyaknya penduduk sekolah mengakhiri masa pendidikannya lebih cepat sebelum lulus/tamat SMA/ sederajat ini menurut BPS provinsi Kalimantan Tengah dikarenakan pada usia jenjang pendidikan menengah, banyak yang berhenti sekolah dan memilih bekerja (Statistik Pendidikan Kalimantan Tengah Tahun 2025, BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2025), dikarenakan juga pada usia jenjang pendidikan menengah, banyak yang berhenti sekolah dan menikah (BKKBN, Angka ASFR 15-19 sebesar 38,9%) dan semangat bersekolah rendah pada usia jenjang pendidikan menengah terutama di perdesaan (Statistik Pendidikan Kalimantan Tengah Tahun 2025, BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2026).

Berdasarkan BKKBN (2025), ASFR 15-19 (Age Specific Fertility Rate) Kalimantan Tengah tahun 2025 sebesar 38,9%. ASFR (Age Specific Fertility Rate) adalah angka kelahiran menurut kelompok umur. Ini adalah indikator demografi yang menunjukkan tingkat kelahiran per 1.000 wanita dalam kelompok umur tertentu yang biasanya 5 tahunan, misal 15-19, 20-24. ASFR dihitung berdasarkan umur ibu yang melahirkan (ibu yang punya anak). Jadi, ASFR 15-19 artinya jumlah kelahiran dari ibu yang berusia 15-19 tahun per 1.000 wanita usia 15-19 tahun. ASFR 15-19 Kalimantan Tengah sebesar 38,9% ini secara tidak langsung menunjukkan juga angka jumlah penduduk wanita usia 15-19 tahun yang berhenti sekolah karena menikah dan melahirkan.

Data dari BKKBN ini selaras dengan data dari BPS Republik Indonesia (2025), bahwa proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun menurut provinsi (Persen), 2024 di Kalimantan Tengah sebesar 8,53%, dan ini lebih besar dari data nasional.

Menurut BPS Kalimantan Tengah, walaupun kondisi finansial ekonomi masyarakatnya mampu tetapi pada daerah dengan faktor geografis yang sekolahnya jauh, akses pencapaian

ke sekolah jauh, dan daerah yang akses pendidikannya terbatas, pada akhirnya banyak yang mengakhiri masa pendidikannya lebih cepat. Kemampuan finansial yang baik cenderung membuka akses yang lebih baik terhadap pendidikan, namun hal tersebut akan sia-sia tanpa adanya motivasi yang kuat dari siswa itu sendiri (BPS Kalimantan Tengah, 2026). Berdasarkan publikasi BPS Kalimantan Tengah di atas pada jenjang menengah motivasi siswa atau semangat siswa bersekolah menjadi hilang karena jauhnya jarak tempuh, harus jauh dari keluarga jika berpindah ke kota. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Yanthi Nomleni et al. (2015), terdapat pengaruh positif dan signifikan lokasi dan jarak tempat tinggal prestasi belajar anak didik. Artinya pada jenjang menengah lokasi dan jarak tempat tinggal berpengaruh pada prestasi belajar, prestasi belajar siswa berpengaruh semangat siswa bersekolah.

Penduduk usia SMA/ sederajat di daerah pedalaman Kalimantan Tengah pada akhirnya memutuskan mengakhiri masa pendidikannya lebih cepat sebelum selesai dikarenakan rasa lelah menjangkau sekolah yang jauh dari rumah, pengeluaran biaya untuk sekolah sangat besar di transportasi dan biaya akomodasi sewa tempat tinggal, pada beberapa penduduk usia SMA/ sederajat, sekolah itu sambil bekerja sendiri di sektor pertanian perkebunan dan tambang sehingga tidak mau keluar desanya untuk bersekolah ke desa terdekat yang ada SMA/ sederajatnya atau ke ibukota kecamatan, juga ada yang karena harus membantu orang tua mereka dirumah atau di ladang. Mereka sebenarnya ingin bersekolah tetapi tetap domisili di rumahnya di desanya.

Hal-hal yang juga menyebabkan banyaknya penduduk/masyarakat di Kalimantan Tengah tidak melanjutkan ke SMA/ sederajat adalah dari sisi Pemerintah Daerah kurang merencanakan dan melaksanakan program kegiatan untuk sarana prasarana pembangunan satuan pendidikan (gedung sekolah baru) dari APBD (Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah)

Dinas pendidikan provinsi Kalimantan Tengah, pada tahun 2025-2026 untuk sarana prasarana pendidikan lebih fokus pada belanja digitalisasi pendidikan bukan sarana prasarana gedung sekolah (Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2026), selain itu juga sejak 2025 dan 2026 untuk pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah mengharap dan mengupayakan didanai melalui program revitalisasi satuan pendidikan dari APBN Kemendikdasmen yang dikelola langsung Kemendikdasmen (Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2025), dan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah perencanaan dan penggaran lebih banyak digunakan untuk kebutuhan yang dianggap urgent dan penting yakni belanja pegawai di sektor pendidikan untuk gaji dan tunjangan guru (Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, 2026).

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa ada 2 faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan suatu negara/daerah di daerah pedalaman yaitu faktor alamiah dan faktor *artificial*. Faktor alamiah adalah faktor alam yaitu kondisi wilayah yang terbentuk secara alamiah tanpa intervensi manusia yaitu kondisi geografis, topografis, hidrologi, geologis dan demografis, dan faktor yang kedua adalah faktor *artificial* yaitu ada intervensi manusia dan dibuat oleh manusia seperti SDM peserta didik, tenaga kependidikan, manajemen/pengelolaan sekolah, sarana dan prasarana sekolah, Infrastruktur seperti sistem transportasi jalan dan jembatan, dan jaringan internet dan hal lain yang sifatnya ada campur tangan manusia. Pada penelitian ini peneliti juga ingin menegaskan pengertian daerah pedalaman yang dimaksud adalah *hinterland* (bahasa Inggris) adalah daerah

perdesaan, daerah yang berada di luar kota, bahkan jauh di luar kota dengan akses pencapaian ke lokasi minim sehingga juga termasuk kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Untuk di Kalimantan Tengah, terkait kualitas pendidikan yang rendah ini yakni terjadinya fenomena rendahnya peluang kesempatan sekolah jenjang menengah dengan bukti-bukti sesuai data dan analisisnya di atas, peneliti menyimpulkan di Kalimantan Tengah hal ini disebabkan karena faktor alamiah di atas yakni kondisi geografis, topografis, hidrologi, geologis dan demografis dan faktor *artificial* yakni kurangnya sarana prasarana pendidikan dan kurangnya Infrastruktur seperti sistem transportasi jalan dan jembatan.

Infrastruktur seperti sistem transportasi jalan dan jembatan adalah faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah pedalaman Kalimantan Tengah sebagai penghubung antar wilayah, mengingat kondisi geografis, topografis dan hidrologi yakni antar desa, antar wilayah dipisahkan hutan, sungai, danau dan rawa.

Selanjutnya adalah mengkonstruksi/membuat alternatif kebijakan yang potensial. Alternatif kebijakan yang dibuat memperhatikan penyebab-penyebab masalah banyaknya penduduk/masyarakat di Kalimantan Tengah tidak melanjutkan ke SMA/ sederajat. Alternatif kebijakan ini dengan berdasarkan analisis data yang mencerminkan permasalahan aktual. Jadi alternatif kebijakan dalam penelitian ini dibuat berbasis data yang telah di analisis di atas dengan mempertimbangan 2 prinsip yang peneliti sebut Fokus Solusi dan Kebijakan Praktis. Prinsip pertama adalah fokus solusi artinya alternatif kebijakan harus bisa menjawab/menyelesaikan masalah yang terjadi, prinsip kedua kebijakan praktis adalah alternatif kebijakan harus bisa dilaksanakan mudah diterapkan untuk menjawab/menyelesaikan masalah yang terjadi.

Dari hasil analisis data, dibuatlah alternatif kebijakan. Alternatif kebijakan yang dibuat adalah 4 alternatif kebijakan, yaitu Pembangunan 1 unit Gedung SMA Baru per zona di tiap 6 Desa yang berdekatan (kode alternatif kebijakan A1), Program Guru Terbang Jenjang Menengah (kode alternatif kebijakan A2), Pembangunan Asrama Siswa di setiap SMA/ sederajat yang sudah ada (kode alternatif kebijakan A3), dan Program Sekolah Jarak Jauh (kode alternatif kebijakan A4).

Kemudian tahap berikutnya dibuat kriteria. Menurut Bardach, (2012), kriteria penilaian alternatif kebijakan harus terukur dan dapat di kuantifikasi. Dengan mengacu pada kriteria Bardach, (2012), maka kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 kriteria yaitu efektifitas, efisiensi, kelayakan, kemudahan pelaksanaan. Tabel Kriteria dijelaskan pada Tabel. 1 berikut:

Tabel 1. Tabel Kriteria

Kode Kriteria	Kriteria	Jenis Kriteria	Keterangan	Bobot
K1	Efektivitas	Technical Feasibility	tingkat atau derajat keberhasilannya dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.	40%
K2	Efisien	Economic and financial Possibility	Tingkat banyak/sedikitnya menggunakan sumber daya (waktu, biaya, tenaga) seminimal mungkin.	30%
K3	Kelayakan	Political Viability	Tingkat penerimaan seluruh pihak/komponen: masyarakat, dan pemangku kebijakan.	10%
K4	Kemudahan Pelaksanaan	Administrative Operability	kemampuan atau kemungkinan untuk dilaksanakan, diimplementasikan sangat mudah/sangat bisa	20%

Sumber : Hasil Analisis, 2026

Tahap berikutnya adalah memberikan skor tiap alternatif kebijakan pada setiap kriteria, dengan metode skoring langsung (direct scoring), dengan rating 1 sampai 5 (1-5), skor tiap kriteria sebagai berikut:

1. Efektivitas, 1 = sangat rendah, 5 = sangat tinggi
2. Efisiensi, 1 = sangat rendah 5 = sangat tinggi
3. Kelayakan, 1 = Sangat mahal, 5 = Sangat murah
4. Kemudahan Pelaksanaan, 1 = sangat sulit, 5 = sangat mudah

Pembobotan *Alternatif 1 (kode A1), Pembangunan 1 unit Gedung SMA Baru per zona di tiap 6 Desa yang berdekatan*, secara efektifitas (K1) yang paling tinggi dapat menyelesaikan masalah utama langsung dengan permanen mendapat sekolah baru, sehingga diberi skor 5 oleh peneliti, secara efisiensi (K2) alternatif 1, yang waktu pelaksanaannya lama dan memakan biaya yang tinggi bukan hanya pada bangunan tapi juga perlu infrastruktur pendukung jaringan jalan, jembatan dan jaringan internet untuk membuka akses ke sekolah sehingga mendapat skor 1, secara kelayakan (K3), alternatif 1 ini layak dan disukai masyarakat karena ada gedung sekolah di desanya sehingga mendapat skor 4. Biasanya jika masyarakat suka dan senang maka pemangku lainnya akan senang pada program ini. Kemudian pada kriteria kemudahan pelaksanaan (K4) mendapat skor 2 karena untuk membangun bangunan baru sangat banyak prosesnya seperti pemilihan, pencarian tanah lokasinya, pembebasan tanah, dan efek setelahnya apakah bangunan masih tetap bisa berfungsi apakah penduduk usia SMA/ sederajat seterusnya banyak di wilayah tersebut.

Pembobotan *Alternatif 2 (Kode A2), Program Guru Terbang Jenjang Menengah*, secara efektifitas (K1) alternatif 2 ini tinggi dapat menyelesaikan masalah utama langsung sehingga dapat skor 5, secara efisiensi (K2) alternatif 2, yang waktu mulai pelaksanaannya bisa lebih cepat, dan tidak memakan biaya yang tinggi sehingga mendapat skor 5, secara kelayakan (K3), alternatif 2 ini layak dan disukai masyarakat karena anak-anak mereka dapat kesempatan sekolah di desa tanpa meninggalkan desanya sehingga dapat skor 4. Kemudian pada kemudahan pelaksanaan (K4) mendapat skor 3 karena perlu koordinasi ke pusat untuk pelaporan dan ijin agar siswa terdaftar di ujian kelulusan tetapi cukup mudah diterapkan.

Pembobotan *Alternatif 3 (Kode A3), Pembangunan Asrama Siswa di setiap SMA/ sederajat yang sudah ada.* Alternatif A3 ini mendapat skor 5 pada kriteria K1. Karena dengan alternatif kebijakan ini dapat mencapai tujuan menyelesaikan masalah utama rendahnya kesempatan sekolah menengah di Kalimantan Tengah. Kemudian secara efisiensi (K2) alternatif 3 ini hampir sama dengan A1, perlu waktu yang lama diawal pembangunan, memakan biaya tinggi pada biaya pembangunan, sehingga diberi skor 3. Secara kriteria kelayakan (K3), alternatif 3 ini layak dan disukai masyarakat karena anak-anak mereka dapat kesempatan bersekolah ke SMA dengan mudah sehingga diberi skor 4. Evaluasi pada kemudahan pelaksanaan (K4) mendapat skor 3 karena mudah diterapkan.

Pembobotan *Alternatif 4 (Kode A4), Program Sekolah Jarak Jauh.* Alternatif A4 ini mendapat skor 5 pada kriteria K1. Karena dengan alternatif kebijakan ini dapat mencapai tujuan menyelesaikan masalah rendahnya kesempatan sekolah menengah di Kalimantan Tengah. Kemudian secara efisiensi (K2) alternatif A4 ini, secara waktu mulai pelaksanaannya bisa lebih cepat hampir sama dengan A2, tetapi memakan biaya tinggi pada penyediaan infrastruktur jaringan internet, sehingga diberi skor 3. Secara kriteria kelayakan (K3), alternatif 4 ini layak dan disukai masyarakat karena anak-anak mereka dapat kesempatan sekolah di desa tanpa meninggalkan desanya sehingga dapat skor 4. Evaluasi pada kriteria kemudahan pelaksanaan (K4) mendapat skor 3 karena mudah diterapkan.

Keseluruh hasil evaluasi kriteria berupa skor bobot tiap alternatif kegiatan bisa dilihat pada Tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2. Skor Alternatif Kebijakan per Kriteria

Kode Alternatif Kebijakan	K1	K2	K3	K4
A1	5	1	4	2
A2	5	5	4	3
A3	5	3	3	3
A4	5	3	4	3

Sumber : Hasil Analisis, 2026

Alternatif Pilihan Kebijakan

Langkah selanjutnya adalah tahap menentukan pilihan Kebijakan. Metode yang digunakan untuk menetapkan kebijakan adalah metode *Weighted Scoring Model* (WSM). Alternatif kebijakan yang mempunyai skor tertinggi merupakan kebijakan yang paling tepat dan sesuai untuk menyelesaikan permasalahan banyaknya penduduk di Kalimantan Tengah terutama di perdesaan yang tidak melanjutkan ke SMA/ sederajat.

Sesuai *Weighted Scoring Model* (WSM), perhitungan dilakukan pada semua alternatif kebijakan. Dengan cara menghitung nilai tertimbang tiap alternatif. Nilai tertimbang adalah skor alternatif kebijakan per kriteria dikalikan dengan bobot kriteria. Perhitungan nilai tertimbang tiap alternatif kebijakan dapat dilihat pada Tabel 3, Tabel 4. Tabel 5 dan Tabel 6, sebagai berikut:

Tabel 3. Nilai Tertimbang Alternatif Kebijakan A1

Kode Alternatif Kebijakan/Kode Kriteria	Rumus	Nilai Tertimbang
A1.K1	$5 \times 0,4$	2,00
A1.K2	$1 \times 0,3$	0,30
A1.K3	$4 \times 0,1$	0,40
A1.K4	$2 \times 0,2$	0,40

Sumber : Hasil Analisis, 2026

Tabel 4. Nilai Tertimbang Alternatif Kebijakan A2

Kode Alternatif Kebijakan	Rumus	Nilai Tertimbang
A2.K1	$5 \times 0,4$	2,00
A2.K2	$5 \times 0,3$	1,50
A2.K3	$4 \times 0,1$	0,40
A2.K4	$3 \times 0,2$	0,60

Sumber : Hasil Analisis, 2026

Tabel 5. Nilai Tertimbang Alternatif Kebijakan A3

Kode Alternatif Kebijakan	Rumus	Nilai Tertimbang
A3.K1	$5 \times 0,4$	2,00
A3.K2	$3 \times 0,3$	0,90
A3.K3	$3 \times 0,1$	0,30
A3.K4	$3 \times 0,2$	0,60

Sumber : Hasil Analisis, 2026

Tabel 6. Nilai Tertimbang Alternatif Kebijakan A4

Kode Alternatif Kebijakan	Rumus	Nilai Tertimbang
A4.K1	$5 \times 0,4$	2,00
A4.K2	$3 \times 0,3$	0,90
A4.K3	$4 \times 0,1$	0,40
A4.K4	$3 \times 0,2$	0,60

Sumber : Hasil Analisis, 2026

Nilai tertimbang per alternatif kebijakan dan total nilai tertimbang dapat dilihat seperti pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7. Nilai Tertimbang Alternatif Kebijakan

Alternatif Kebijakan	Nilai Tertimbang (skor x bobot)				Total Nilai Tertimbang/Nilai Akhir Kebijakan Alternatif
	K1	K2	K3	K4	
	(0,4)	(0,3)	(0,10)	(0,20)	
A1	2,00	0,30	0,40	0,40	3,10
A2	2,00	1,50	0,40	0,60	4,50
A3	2,00	0,90	0,30	0,60	3,80
A4	2,00	0,90	0,40	0,60	3,90

Sumber : Hasil Analisis, 2026

Berdasarkan metode *Weighted Scoring Model* (WSM), alternatif kebijakan A1, A2, A3 dan A4 pada kriteria K1 efektifitas mencapai tujuan menyelesaikan masalah mendapat nilai tertimbang yang sama, artinya keempat program ini sama-sama mempunyai kemampuan yang sama besar dalam menyelesaikan permasalahan banyak penduduk di Kalimantan Tengah terutama di perdesaan tidak melanjutkan ke SMA/ sederajat.

Tetapi pada kriteria K2 alternatif kebijakan yang paling unggul adalah A2 Program Guru Terbang Jenjang Menengah, artinya Program Guru Terbang Jenjang Menengah yang paling efisien dibanding 3 alternatif kebijakan lainnya. Program ini menggunakan sumber daya (waktu, biaya, tenaga) paling minimal tetapi punya keberhasilan yang maksimal. Sedangkan A3 dan A4 mempunyai nilai tertimbang yang sama dan nilai tertimbang terendah adalah A1

Pada Kriteria K3 dan K4, pada seluruh alternatif kebijakan ini hampir mempunyai nilai yang sama. Pada K3, alternatif A1, A2 dan A4 mempunyai nilai tertimbang, dan alternatif A3 mempunyai nilai tertimbang paling rendah. Kriteria K4, terdapat 3 alternatif kebijakan yang mendapat nilai tertimbang sama yakni A2, A3 dan A4m sedangkan A4 nilai tertimbangnya rendah pada K4.

Nilai akhir tiap alternatif kebijakan adalah A1 sebesar 3,10, ranking ke 4, A2 sebesar 4,50 ranking ke 1, A3 sebesar 3,80 ranking dan A4 sebesar 3,90. Ranking tiap alternatif kebijakan dapat dilihat pada Tabel 8 berikut:

Tabel 8. Ranking Nilai Akhir Tiap Alternatif Kebijakan

Kode Alternatif Kebijakan	Total Nilai Tertimbang	Ranking/Peringkat
A1	3,10	4
A2	4,50	1
A3	3,80	3
A4	3,90	2

Sumber : Hasil Analisis, 2026

Alternati kebijakan A2 Program Guru Terbang Jenjang Menengah adalah alternatif kebijakan yang mendapat total nilai tertimbang tertinggi dibandingkan dari 3 alternatif kebijakan lainnya. Dengan demikian, kebijakan yang direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengatasi fenomena rendahnya kesempatan penduduk usia SMA/ sederajat sekolah di jenjang menengah adalah program Guru Terbang Jenjang Menengah. Program ini bukan hanya untuk mengatasi agar semua penduduk usia SMA/ sederajat bisa duduk di bangku SMA/ sederajat sampai lulus dan memperoleh ijazah kelulusan SMA. Tetapi juga untuk mewujudkan program gubernur Kalimantan Tengah tahun 2026 Program Satu Keluarga Satu Sarjana.

Program Satu Desa Satu Keluarga adalah bagian dari janji politik Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dituangkan dalam Visi Misi Gubernur yang termuat dalam RPJMD dan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam program lima tahun 2025-2029 dan dimulai pada tahun 2026 ini. Ketercapaiannya program ini mulai dilihat dan dievaluasi pada akhir 2026. Program Guru Terbang Pendidikan Menengah ini bisa menjadi awal program untuk mencapai target Program Satu Keluarga Satu Sarjana.

Dengan kebijakan Program Guru Terbang Jenjang Menengah ini secara langsung dapat meningkatkan kualitas Pendidikan Kalimantan Tengah yang akhirnya dapat meningkatkan kualitas SDM Kalimantan Tengah. Agar Program Guru Terbang Jenjang Menengah ini dapat efektif dalam pencapaian tujuan mengatasi banyak penduduk di Kalimantan Tengah terutama di perdesaan tidak melanjutkan ke SMA/ sederajat maka koordinasi antar perangkat daerah perlu dilakukan. Koordinator pada program Guru Terbang Jenjang Menengah ini adalah koordinasinya antar instansi di lingkup provinsi Kalimantan Tengah adalah dengan Kementerian Agama Provinsi, Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Menengah SMA/ sederajat.

Dalam pelaksanaan Program Guru Terbang Jenjang Menengah, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program perlu dilakukan. Menjamin kesejahteraan dan keamanan guru-guru selama perjalanan dinas ke pedalaman untuk mengajar, dengan setiap anggaran perjalanan dinas diterima dengan lengkap oleh guru-guru dan menjamin proses mengajar belajar terlaksana di desa pedalaman yang dituju. Fungsi pengawasab program pada Inspektorat harus berjalan dengan tegas demi tidak terjadi penyimpangan pelaksanaan program.

Dalam pelaksanaan Program Guru Terbang Jenjang Menengah, harus di evaluasi secara berkala triwulan dan semesteran. Indikator yang menjadi alat ukur capaian kinerja tahunannya (outcomes) adalah Rata-rata lama sekolah RLS (BPS), Jumlah lulusan SMA/ SMK (Kemendikdasmen). Untuk Indikator semesterannya (output) adalah jumlah siswa yang mengikuti Program Guru Terbang Jenjang Menengah. Koordinasi dan tanggung jawab data jumlah siswa pada Program Sekolah Guru Terbang adalah pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada program Guru Terbang Pendidikan Menengah ini, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan sekolah-sekolah jenjang menengah terdekat. Perlu dibuat Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi tentang sekolah-sekolah penyelenggara Program Guru Terbang agar semua peserta didik yang bersekolah di Program Guru Terbang agar terdaftar pada Kemendikdasmen dalam Dapodik. Sekolah yang menyelenggarakan bertanggung jawab pada mengeluarkan buku Raport, Ijazah kelulusan dan mendaftarkan peserta didik/ siswa di Dapodik

Guru-guru pengajar pada Program Guru Terbang diambil dari guru-guru SMA/ sederajat yang jaraknya tidak jauh dari desa pedalaman lokasi mengajar dikecualikan jika untuk guru keahliah mata pelajaran tertentu pada sekolah terdekat tidak ada. Guru pada Program Guru Terbang bertugas dan bertanggung jawab mengajar dan memberi evaluasi dan nilai untuk peserta didik/ siswa dan menyerahkan daftar nilai kepada Sekolah Induk Program Guru Terbang Pendidikan Menengah.

Kualitas guru yang mengajar dalam Program Guru Terbang Jenjang Menengah harus diperhatikan. Dipersyaratkan harus benar-benar guru yang punya etos mengajar tinggi. Dengan kemampuan akademik yang tinggi pula. Selain etos mengajar, guru pada Program Guru Terbang Jenjang Menengah juga dipersyaratkan mempunyai komitmen mensukseskan Program Guru Terbang Jenjang Menengah. Guru-guru yang mengajar di Sekolah Program Guru Terbang diperbolehkan dari guru satuan pendidikan SMA/ sederajat sekolah Swasta dan dari guru-guru yang berada dibawah Kementerian Agama di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Rekomendasi Kebijakan

Kebijakan Program Guru Terbang Jenjang Menengah ini agar dapat berjalan dengan baik perlu didukung dengan regulasi pemerintah sebagai pedoman dan landasan hukum bagi pelaksanaan program ini. Perlu disusun suatu kerangka peraturan yang mengatur tugas, wewenang serta pelaksanaan program serta mengatur standar operasional prosedur pelaksanaan, koordinasi antar instansi terkait.

Rekomendasi Kebijakan ini ditujukan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia agar dapat menuangkan kebijakan ini dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menyediakan mekanisme pengelolaan atau penyelenggaraan pendidikan di daerah pedalaman yakni daerah perdesaan, daerah yang berada di luar kota, bahkan jauh di luar kota dengan akses pencapaian ke lokasi sekolah minim sehingga juga termasuk kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), dengan memuat *kebijakan Program Guru Terbang*.

Melihat hasil analisis bahwa ke-4 alternatif kebijakan yang dibuat dalam penelitian efektifitas tinggi untuk mencapai tujuan menyelesaikan masalah artinya keempat program ini sama-sama mempunyai kemampuan yang sama besar dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan di daerah pedalaman maka ke-4 kebijakan ini disarankan masuk dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Pedalaman.

Selain itu Peraturan Menteri ini juga harus memuat keikutsertaan pendukung dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian PUPR, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Energi dan SDM, TNI/Polri, serta kementerian terkait. Peraturan Menteri ini bukan hanya untuk Kalimantan Tengah tetapi untuk seluruh wilayah pedalaman di Indonesia.

Selanjutnya kepada Provinsi Kalimantan Tengah direkomendasikan untuk membuat Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Program Guru Terbang Jenjang Menengah Kalimantan Tengah. Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bisa memulainya lebih dulu tetapi tetap mengupayakan dukungan dari Pemerintah Pusat dalam Peraturan Mendikdasmen RI sebagaimana dijelaskan di atas. Peraturan Gubernur diperlukan untuk memulai program ini sebagai landasan hukum dan pedoman pelaksanaan program ini. Regulasi

untuk program ini dibuat secara komprehensif dan terstruktur dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan program yang efektif. Dari Peraturan Gubernur diturunkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Tengah sebagai aturan pelaksanaan.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan pendidikan di daerah pedalaman tidak bisa disamakan dengan di wilayah perkotaan. Daerah pedalaman yang dimaksud adalah *hinterland* (bahasa Inggris) adalah daerah perdesaan, daerah yang berada di luar kota, bahkan jauh di luar kota dengan akses pencapaian ke lokasi desa minim sehingga juga termasuk kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Temuan dalam penelitian ini adalah 1). Dua faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan suatu negara/daerah di daerah pedalaman yaitu faktor alamiah dan faktor *artificial*. Faktor alamiah adalah faktor alam yaitu kondisi wilayah yang terbentuk secara alamiah tanpa intervensi manusia yaitu kondisi geografis, topografis, hidrologi, geologis dan demografis, dan faktor yang kedua adalah faktor *artificial* yaitu ada intervensi manusia dan dibuat oleh manusia seperti SDM peserta didik, tenaga kependidikan, manajemen/pengelolaan sekolah, sarana dan prasarana sekolah, Infrastruktur seperti sistem transportasi jalan dan jembatan, dan jaringan internet dan hal lain yang sifatnya ada campur tangan manusia. 2). Untuk di Kalimantan Tengah, terkait kualitas pendidikan yang rendah disebabkan karena faktor alamiah di atas yakni kondisi geografis, topografis, hidrologi, geologis dan demografis dan faktor *artificial* yakni kurangnya sarana prasarana pendidikan dan kurangnya Infrastruktur seperti sistem transportasi jalan dan jembatan.

Berdasarkan temuan penelitian, rekomendasi kepada Pemerintah Pusat disarankan membuat regulasi khusus penyelenggaraan pendidikan di daerah pedalaman Indonesia, dalam kerangka Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal ini karena karakter wilayah pada daerah pedalaman yang berbeda dari perkotaan. Rekomendasi untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah melaksanakan program Guru Terbang Pendidikan Menengah dan segera menyiapkan regulasinya, berupa peraturan gubernur dan Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Tengah.

REFERENSI

- AdiTriyanto, S., Sanuri, S., & Amin, M. (2022). Analisis pembangunan ekonomi Indonesia menuju negara maju pada tahun 2045. *Tasyri': Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah*, 4(1), 26–41.
- Artamevia, A., Surya, D., Fiti, T. K., & Kusumaningrum, H. (2025). Pengembangan SDM berkualitas: Kunci sukses institusi pendidikan. *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 1–11.
- Asrulla, A., Indriyani, T., & Jeka, F. (2024). Tantangan manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan di era Society 5.0. *Jurnal Genta Mulia*, 15(1), 161–178.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2025). *Data AFSR 15–19 Provinsi Kalimantan Tengah*. <https://siperindu.online/dashboard/>
- Badan Pusat Statistik. (2025a). *Berita resmi statistik: Indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Tengah 2025*.
- Badan Pusat Statistik. (2025b). *Proporsi perempuan umur 20–24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun menurut provinsi (persen), 2024*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>
- Badan Pusat Statistik. (2025c). *Rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas menurut provinsi, 2025*. <https://www.bps.go.id/assets/statistics-table/2/MTQyOSMy/rata-rata-lama-sekolah-penduduk-umur-15-tahun-ke-atas-menurut-provinsi.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. (2025). *Statistik kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. (2026). *Statistik pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025*.
- Bardach, E. (2012). *A practical guide for policy analysis: The eightfold path to more effective problem solving*. CQ Press.
- Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis with special reference to education*. University of Chicago Press. (Karya asli diterbitkan 1964)
- Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. (2026). *Fakta singkat hutan Kalimantan Tengah*. <https://dishut.kalteng.go.id/berita/>
- Faiq, A., & Putra, D. A. A. (2025). Pemberdayaan dan pembangunan: Strategi masyarakat Madura dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan (studi di Desa Buluh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan). *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 11(3), 269–275.
- Fauzi, Y., & Subur, R. (2025). Analisis tingkat pendidikan sebagai potensi sumber daya manusia dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Jawa Barat. *Journal of Research and Publication Innovation*, 3(1), 878–886.
- Gunter, A. (2025). The geography of distance education: Spatial disparities, accessibility, and impact across place. *South African Geographical Journal*. Routledge.
- Iskandar, R., & Rahayu, S. (2023). Village administration and MSME formalization: Institutional support for rural economic development. *Journal of Bina Praja*, 15(1), 45–58.
- Kriswantara, G., & Sandi, J. R. A. (2025). Kebijakan pemerintah daerah terhadap sekolah-sekolah di wilayah pedalaman (area rural) dan dampaknya terhadap pendidikan Kalimantan Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*.
- Nomleni, Y., Arjana, I. G. B., & Kalla, J. N. (2015). Pengaruh lingkungan geografis terhadap prestasi belajar peserta didik kelas XI IPS mata pelajaran geografi. *Jurnal Pendidikan dan*

- Pembelajaran*, 22(1).
- Pijoh, F. E. (2025). Gender analysis in higher education access in remote area. *Educatio and Social Science Journal*.
- Silalahi, S., Nasution, T., Suriyani, S., & Siregar, W. W. (2022). Manajemen sumber daya manusia dalam membangun kualitas pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(3), 1835–1846.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretif, interaktif dan konstruktif*. Alfabeta.
- United Nations. (2025). *Sustainable development goals*. <https://sdgs.un.org/goals>
- Yansyah, D., Wati, E. R. K., Nurrizalia, M., Kurniawan, M. I., Batrisya, A., & Wulandari, R. (2024). Pengaruh pendidikan bagi perempuan untuk mendapat kesempatan kerja guna meningkatkan perekonomian keluarga. *Jurnal Pendidikan Non Formal*, 1(3), 13.
- Yulianti, A., Damanik, I. L., & Siregar, R. C. (2023). Problematika pendidikan di negara maju dan berkembang. *Raziq: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 160–167.
- Zhang, K. (2025). Empowering educator: Overcoming challenges in digital education for remote area. Dalam *Proceedings of the 3rd International Conference on Social Psychology and Humanity Studies*.